BAB III

KONFLIK KRONIS PELANGGARAN HAM di TIMOR TIMUR PRA-INTEGRASI HINGGA INTEGRASI 1975-1976

Pelanggaran HAM yang terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama di Timor Timur dan tidak kunjung menemukan titik terang penyelesaian persoalan ini kian pelik. Selama masa pra-integrasi hingga integrasi tahun 1975-1976 telah terjadi konflik yang sangat kronis dan ironi. Kita dapat melihat bnyak orang yang tidak bersalah menjadi korban dari tragedi ini. Kemerdekaaan yang diinginkan oleh negara bekas jajahan Portugs itu pun tidak kunjung tiba. Justru menambah persoalan pelanggaran HAM yang melibatakan banyak pihak ini kian pelik terjadi.

Penghancuran sara umum seperti gereja-gereja dan perusakan rumah-rumah warga yang dianggap pro dengan partai yang selalu menyuarakan ingin mendapatkan kemerdekaan dihancurkan. Orang-orang yang masih berstatus diduga ikut campur tangan juga ikut dihilangkan, bahkan tidak jarang dibunuh. Akibatnya banayak korban berjatuhan pada masa ini. Pemerintah yang berupaya keras untuk membantu meredam permasalahan ini pun ikut kewalahan. Berbagai macam pihak sudah diturunkan namun masalah ini bukannya terselesaikan malah justru menjadi kian rumit untuk diselesaikan. Khususnya untuk permasalahan didalam negerinya sendiri. Bagaimana sikap Indonesia yang seharusnya ditunjukkan dalam masalah ini. Karena salah bertindak bisa berakibat fatal. Bukan bagi Indonesia saja, tetapi juga negara lain.

A. Masalah Dalam Negeri

1. Situasi Timor-Timur 1975

Keadaan di Timor Timur pada saat pra-integrasi pada tahun 1975 sebenarnya cukup memprihatinkan. Keinginannya untuk dapat merdeka dari jajahan Portugis dan lepas dari Indonesia belum mendapatkan hasil yang pasti. Keadaan kian mencekam, manakala kekerasan terhadap rakyat sipil terus terjadi. Pembantaian, penghilangan orang secra paksa, pemerkosaan dan penganiayaan terus terjadi. Teror pun juga tidak luput pada masa itu. Bahkan rakyat sipil yang ingin pergi meninggalkan wilayahnya tidak bisa dengan leluasa pergi begitu saja. Jika masyarakat yang pro-demokrasi keluar dari wilayah tersebut atau melewati wilayah yang ditempatinya ke tempat yang pro-milisi maka akan diculik yang kemudian disiksa hingga dibunuh.

Sebagai negara jajahan Portugal. Sebagian besar wilayahnya diduduki oleh penjajah pada masa itu. Namun sejak Portugal menandaskan niatnya memerdekakan jajahannya satu ini, di timur perbatasan NTT itu berbagai gerakan pembebasan makin meningkat kampanyenya. Masyarakat sipil semakin kuat menyerukan untuk meminta kebebasan dan merdeka dari penjajahan dan ingin memisahkan diri untuk tidak mau menjadi wilayah otonom. Bahkan partai birokrat yang masih menginginkan pendekatan dengan Portugal, Uni Demokrasi Timor (UDT) sudah menyadari perlunya negeri itu mempersiapkan

Seperti yang sudah dijelaskan berkali-kali oleh pejabat teras Indonesia, RI setiap saat akan menyambut baik masuknya Timor Portugis kedalam wilayah Indonesia. Sikap ini disambut baik oleh Australia dan juga pasti akan mendapatkan perlakuan yang sama dari negara-negara ASEAN. Akan tetapi Timor Timur tetap pada pendiriannya yakni tetap ingin memisahkan diri dari Indonesia dan memperoleh kemerdekaan. Hidup dalam bayang-bayang militer Indonesia membuat mereka takut dan trauma. Tanpa disadari atau tidak akan tetapi pada kenyataannya memang begitu. Tidak sedikit militer Indonesia yang ikut melakukan tindak kejahatan di Timor Timur. Hal inilah yang membuat Timor Timur tidak mau tetap menjadi NKRI.[42]

Selain itu juga partai UDT (Union Democratica Timorense) telah mengambil keputusan tegas dengan mengakhiri koalisinya dengan partai Fertillin, dengan pertimbangan bahwasannya demi menyelamatkan kepentingan rakyat Timor dan demi kelselamatan Timor-Dilli sebagai suatu bangsa yang sungguh-sungguh bebas dan merdeka. Menurut berita yang diterima partai UDT secara terang-terangan dalam pidatonya berkata jika meminta untuk memaklumi keputusan yang diambil oleh partai UTD untuk mengakhiri koalisinya tersebut secara sepihak. Keputusan itu diambil atas dasar pertimbangan-pertimbangan bahwa :

a) Prinsip-prinsip yang dikemukakan dalam dokumen dasar koalisi tersebut telah dengan sistematis dan terang-terangan disalah gunakan dan disalah artikan oleh Fertillin, tindakan yang berubah dari agresif-ideologis menjadi tindakan agresif yang secara fisik yang sedemikian rupa hingga membuat atau menimbulkan situasi dimana rakyat merasa tidak aman lagi

[42] Tempo 22 februari 1975,yang diambil dalam buku *Dokumentasi Pra-Integrasi Timor Timur -1975*,CSIS,Jakarta Pusat. 1983, hlm. 28

b) Dikalangan tokoh-tokoh yang bertanggungjawab dari Fertillin terdapat orang-orang yang secara aktif dan langsung bekerjasama dengan sistim represip dari rezim yang sudah tersingkir dan saat ini mengaku jika dirinya menjadi pembela-pembela dan pembebas rakyat, maka dengan begitu UDT meragukan maksud Fertillin yang sesungguhnya

c) Tingkah laku politik Fertillin telah menunjukkan suatu tingkah laku politik yang dapat dengan sungguh-sungguh mengkompromikan kemerdekaan Timor-Dilli, dalam langkah-langkah dimana partai tersebut akan mendapatkan bahaya dalam keamanan dan stabilitas politik dalam Negeri.

d) Cabang-cabang anggota-anggota dan pendukung-pendukung UDT telah menuntut dengan tegas dibubarkannya koalisi dengan alasan-alasan yang sama

e) UDT sesuai dengan tujuan utamanya, yakni berjuang untuk kemerdekaan Timor Timur (Timor-Dilli) dan untuk mencapai kemajuan dibidang sosial, ekonomi dan kebudayaan bagi rakyat di daerah ini dengan keadaan atau kondisi yang damai, tertib dan rukun serta sejahtera.

f) UDT menyadari tanggung jawabnya dalam melaksanakan tugas-tugasnya baik yang menyangkut urusan dalam negeri maupun luar negeri ini tidak mudah.[43]

Kemudian keadaan di Timor Portugis menjadi kian memanas dan begejolak setelah petugas menara pengawas di Darwin menerima sebuah pesan singkat yang berisi : "suatu kudeta telah dilancarkan di Timor Portugis". Pengiriman pesan tersebut berasal dari kota Dilli yang jaraknya kurang lebih sekitar 500 km dari

Darwin. Tidak dijelaskan dalam pesan radio tersebut siapa yang melakukan aksi perebutan kekuasaan tersebut. Kemudian petugas menara Dilli menambahkan bahwasannya pelabuhan udara Bacau di Dilli dinyatakan tertutup.

Berita yang masih belum pasti ini kemudian segera mendapatkan perhatian. Bukan saja dari pemerintah pusat Portugis di Lisabon, tetapi juga pemerintah Australia dan Indonesia yang menjadi tetangga dekat koloni Portugis tersebut. Keadaan jadi semakin simpang siur ketika Kementrian Penerangan di Lisabon mengeluarkan pernyataan membantah adanya perebutan kekuasaan. Menurutnya "Memang terjadi kerusuhan namun tidak ada kudeta." sedangkan laporan yang sampai ke Departemen Luar Negeri Australia menyebutkan jika peristiwa tadi adalah suatu pameran kekuatan dari salah satu pihak di Timor Portugis.

Kudeta atau pun pamer kekuatan yang jelas UDT telah menduduki atau menguasai tempat-tempat strategis di Koloni tersebut. Menurut laporan yang ada bahwasannya UDT telah menduduki stasiun radio, markas besar Angkatan Darat dan Polisi. Maka dengan keadaan ini Indonesia menjadi sangat berhati-hati dalam memberikan komentar atau tanggapan. Bahkan Indonesia menurut pernyataan yang diwakilkan oleh Menteri Luar Negerinya "Indonesia tidak akan melakuaan penyerangan ataupun pembentukan pasukan di perbatasan.[44]

Bagaimana pun saat ini keadaan Timor Portugis nampaknya makin sulit diatasi. Sampai saat terakhir masih juga belum jelas akan perkembangan kerusuhan yang terjadi di Timor Portugis itu. Maka dengan sangat hati-hati negara-negara yang mempunyai hubungan dekat dengan Timor Portugis mendatangi tempat tersebut. Karena jika terjadi kesalahan sedikit saja bisa fatal

akibatnya.[45]

Masalah Timor Portugis, telah berulangkali pejabat-pejabat Indonesia yang berwenang menegaskan pendirian pemerintahan Indonesia tentang Timor Portugis, bahwa Indonesia tidak mempunyai keinginan expansionis terhadap wilayah tersebut. Sebab selain hal tersebut bertentangan dengan salah satu prinsip yang mendasari kelahiran Republik ini, merebut wilayah yang dari segi ekonomi sangat miskin itu hanya akan menambah beban rakyat Indonesia yang sudah berat ini. Pendirian inilah yang menyebabkan mengapa pemerintah Indonesia sejak semula menyambut baik rencana pemerintah Portugis untuk memberi kesempatan kepada rakyat daerah tersebut menentukan nasibnya sendiri melalui suatu referendum.

Selain memberikan kesempatan untuk menentukan nasib sendiri ini adalah merupakan prinsip yang selalu dipegang teguh dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Maka hasil referendum yang betul-betul mencerminkan keinginan seluruh rakyat Timor Portugis, tentulah akan memungkinkan rakyat daerah ini menciptakan stabilitas daerahnya sebagai syarat mutlak untuk bisa melaksanakan pembangunan guna meningkatkan taraf hidupnya.

Tetapi bila daerah tersebut sekarang sengaja dibikin kacau apalagi dengan menyebar luaskan kebencian terhadap Indonesia, maka sangat wajar sekali jika Menlu Adam Malik memberi tanggapan yang barangkali patut mendapatkan perhatian pemerintah portugis. Menurut bebrapa sumber yang ada kampanye membenci Indonesia ini dilakukan sejalan dengan gerakan mengkomunikasikan Timor Portugis yang dipimpin oleh Gubernur barunya, Lemos pires.

Ada beberapa hal yang sepertinya patut mendapatkan perhatian kita dari kejadian ini. Pertama, kampanye membenci Indonesia oleh suatu daerah atau negara tetangga yang selama ini kita anggap bersahabat, tentulah tidak bisa kita biarkan berlalu begitu saja, serta patut dibicarakan dengan pemerintah Portugis. Kedua, jika komunikasi yang dilakukan ini sejalan dengan keinginan seluruh rakyat Timor Portugis melalui penentuan nasib sendiri yang bebas dari segala tekanan apalagi teror, maka hal itu tentu bisa diterima Indonesia sebagai kenyataan.

Akan tetapi yang disayangkan adalah komunikasi yang telah dilakukan kini berjalan dengan serentak dengan kampanye yang menyerukan untuk anti Indonesia dan dilakukan melalui teror yang nyata-nyata menimbulkan kerugian bagi Indonesia. Selain itu hal tersebut juga menimbulkan suasana permusuhan dikalangan rakyat tetangga, yang justru bertentangan dengan usaha Indonesia untuk bisa memupuk persahabatan dengan siapapun juga. Teror yang dilakukan juga telah menimbulkan pelarian-pelarian memasuki wilayah Indonesia yang dengan sendirinya akan menimbulkan problem atau masalah-masalah sosial baru sebagai beban tambahan dari masalah yang sudah ada.

Masalah Timor Portugis menghangat akhir-akhir ini. Karena disebabkan oleh pernyataan pihak Australia yang menuduh Indonesia sedang bersiap-siap untuk memasuki wilayah jajahan Portugis itu. Hal ini dilakukan karena Australia ingin mengganggu urusan dalam negeri yang pada saat itu pemerintahannya yang

masalah dalam negeri Australia sendiri, maka seharusnya Indonesia tidak perlu ikut campur atau ambil pusing dalam urusan itu. Namun karena masalah Timor Portugis yang dibawa-bawa dan disangkutpautkan, maka hal itulah yang menjadi perhatian lebih Indonesia.

Masalah Timor Portugis tidak terus melulu dipandang dari segi Indonesia, namun juga ditinjau dari segi rakyat Timor Portugis sendiri dan komitmen pemerintah Portugis, yang sampai pada masa itu tetap berkomitmen masih menduduki wilayah tersebut. Maka sesuai dengan politik baru pemerintahan Portugis, yang ditunjang oleh gerakan militer, bagi daerah Timor Portugis berlaku proses dekolonialisasi. Dalam kerangka proses itu terbuka 3 kesempatan bagi rakyat atau penduduk Timor. Yakni antara lain adalah merdeka berdaulat, tetap bergabung dengan Portugis misalnya dalam iktan persemakmuran atau bergabung dengan Indonesia.

Kebetulan disana ketiga alternatif itu adalah penunjangnya. Fretillin menghendaki kemerdekaan. Apodeti menginginkan tetap bergabung dengan Portugal dan UDT mengusahakan penggabungan dengan Indonesia. Sebelumnya sudah pernah disepakati dalam perundingannya dengan Indonesia jika akan ditempuh proses yang untuk menampung keinginan rakyat Timor Portugis untuk demokrasi.

Dalam proses itulah ketiga partai berkampanye. Dalam usaha kampanye bukan saja penduduk di dalam negeri menjadi sasaran. Mereka juga meminta simpati negra-negara lain, termasuk Australia, Portugis sendiri dan Indonesia. Kemudian perkembangan itu sendiri menjadi tidak wajar, ketika Fretillin dan

sehingga sekitar seratus ribu orang sempat berlari ke Timor Indonesia. Selain itu kelompok yang ingin bergabung dengan Indonesia, tidak dibiarkan berkembang secara wajar.

Timor Portugis tidak termasuk kedalam wilayah yang menjadi aspirasi nasional Republik Indonesia. Aspirasi tersebut telah dipenuhi dengan masuknya Irian Jaya kedalam wilayah Republik Indonesia. Karena kalaupun Timor bagian Timur itu masuk kedalam wilayah kita, maka sudah dapat diprediksi jika kita sebagai negara Republik Indonesia akan berjuang untuk mendapatkan wilayah tersebut dengan cara apapun agar tidak jatuh ke negara lain pada masa perjuangan tahun enampuluhan. Periode itu pun kini sudah terlewati sangat lama sekali. Karena kini saatnya untuk kita mengrefleksikan kepada negara kita sendiri untuk dapat memperbaiki taraf hidup seluruh rakyat. Maka kita bisa saja bersikap acuh dan tidak peduli terhadap perkembangan rakyat Timor Portugis.

Karenanya apapun yang terjadi di Timor Portugis bukan menjadi urusan kita lagi. Karena Timor Portugis sudah memilih untuk merdeka dan tidak mau menjadi negara atau wilayah bagian kita lagi. Tanggungjawab atas kesejahteraan rakyat dan kehidupan yang layak bagi masyarakatnya kini sudah sepatutnya untuk dipikirkan sendiri. Indonesia sudah tidak lagi ikut campur atau ikut andil mengambil bagian dari permasalahan ini. Karena sudah tidak termasuk dalam wilayah Indonesia lagi.

Selain itu perbatasan yang mereka buat sendiri kini malah seakan menjadi petaka bagi mereka. Andai saja kawasan perbatasan anatara Timor Portugis dan Timor Barat yang dimiliki Indonesia masih bisa berhubungan dekat maka

kenyataannya. Jika saja mereka masih bisa bergabung maka tidak menutuo kemungkinan pembangunan pun akan ikut terjadi disana dan kepentingan nasional masing-masing bisa terpenuhi.

Saat ini Indonesia merasa sangat terpukul dengan keadaan yang ada di Timor Portugis. Meskipun sudah mencoba untuk bersikap acuh tetap saja, rasa iba selalu datang menghampiri jika kita mendapatkan kabar yang kurang baik dari Timor Portugis. Selalu ada rasa inigin membantu dan meringankan beban mereka. Karena bagaimanapun Timor Portugis juga pernah menjadi salah satu wilayah Republik Indonesia.

Mendapatkan laporan-laporan .tentang perkembangan di Timor Portugis membuat hati kita sedih dan prihatin. Karena pasalanya kita tidak pernah menduga jika perkembangan itu berubah begitu cepat sekali dan mengarah pada sikap anarki yang mengakibatkan kesengsaraan yang tidak kecil. Gubernur Lamos Pires dilaporkan juga ikut menangis melihat banyaknya korban yang berjatuhan. Korban yang berjatuhan tersebut kebanyakan adalah wanita dan anak-anak.

Korban-korban yang tidak bersalah yang berada diambang harapan menentukan nasibnya sendiri untuk merdeka. Korban yang tidak tahu apa-apa yang harus menjadi korban dari aksi anarki tersebut. Jika dilihat dari segi kemanusiaan kita, tidak dapat berbuat lain. Namun kita harus tetap mengulurkan tangan dan memberikan bantuan untuk meringankan beban dan penderitaan mereka. Pemerintah Republik Indonesia sendiri telah menerima permintaan untuk bersama-sama pemerintah Australia untuk membantu pengungsian warga yang

Hal ini dimaksudkan setidaknya untuk mengurangi jumlah korban yang berjatuhan dari aksi anarki tersebut. Akibat aksi anarki ini banyak pihak yang merasa dirugikan. Bukan hanya dari materi tetapi juga dari psikologis. Karena mereka harus rela kehilangan rumah sebagai tempat untuk mereka tinggal dan juga mereka harus kehilangan sanak saudara mereka yang menjadi korban. Mereka harus tinggal di barak-barak pengungsian, di tempat yang tidak begitu nyaman dan harus rela tidur dan makan berbagi tempat dengan yang lainnya.

Permintaan untuk membantu mengevakuasi korban dan sebagian masyarakat yang tinggal di daerah tersebut pun sudah terealisasikan. Kini bantuan-bantuan berupa bahan pangan, baju-baju dan obat-obatan telah datang untuk mereka. Ini setidaknya bisa sedikit membantu mereka untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka. Aksi anarki ini tampaknya sekarang menjadi semakin tidak terkendali dan akan semakin menambah penderitaan rakyat Timor Portugis di daerah perbatasan.

Sebenarnya dengan keaadaan atau kondisi seperti ini maka akan menjadi kesempatan yang bagus sekali untuk Indonesia untuk dapat mengajak Timor Portugis bergabung kembali dengan Indonesia. Namun hal ini tidak dilakukan Indonesia, dan Indonesia tetap pada pendiriannya untuk tetap tidak ikut campur dalam urusan politik dalam negeri Timor. Indonesia tetap ingin bertahan pada pendiriannya jika kesejahteraan rakyat Timor untuk merdeka tetap menjadi acuan dan akan tetap terus mendukung untuk rakyat Ti or untuk bisa merdeka dan menentukan nasibnya sendiri.

Indonesia bisa bersikap konsekwen dan tetap berpegang teguh pada pendiriannya untuk tidak mencampuri urusan tersebut. Meskipun Indonesia

satu alasan atau rencana Indonesia untuk mengambil Timor kembali ke wilayah Indonesia. Hal itu dilakukan karena semata-mata Indonesia merasa iba dan hanya ingin membantu mengurangi penderitaan rakyat Timor.

Indonesia juga tidak mau menjadi penengah dalam kasus anarki yang terjadi di Timor ini. Karena jika tidak ada perintah langsung yang resmi maka Indonesia tidak mau membantu atau sebagai penengah anarki di Timor. Bukan karena Indonesia sudah tidak peduli akan tetapi Indonesia tidak ingin jika masalah ini menjadi semakin berlarut-larut. Tetapi jika Indonesia diberikan amanah langsung dari PBB untuk diminta menjadi penengah atau menjadi pihak ketiga untuk menyelesaikan masalah ini, maka dengan senang hati Indonesia membantu menyelesaikannya. Akan tetapi sampai saat ini pun belum ada perintah dari PBB langsung kepada Indonesia untuk menyelesaikan masalah anarki ini.[46]

2. Kewajiban Moril Indonesia Untuk Timor Portugis

Pemerintah Indonesia akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu atau penting untuk menjamin keamanan wilayah nasional, menjaga kedaulatan negara dan melindungi penduduk dari gangguan luar. Berdasarkan azaz anti kolonialisme dan peri kemanusiaan. Maka pemerintah Indonesia bersama dengan rajyat Indonesia mempunyai kewajiban moril untuk melindungi seluruh rakyat di wilayah Timor Portugis agar proses dekolonialisasi dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang sesuai. Serta dapat mewujudkan cita-cita dan keinginan seluruh rakyat Timor Portugis.

---

[46] Tempo, 22 Januari 1975, [illegible] *integrasi Timor Timur 1975*, hlm 51

Maka dengan adanya kewajiban moril tersebut pemerintah Indonesia menghimbau kepada seluruh masyarakat dan kelompok elemen-elemen penting negara untuk tetap fokus pada tujuan tersebut. Selain itu pemerintah Indonesia juga berpesan untuk masyarakat Indonesia yang tinggal di daerah perbatasan Timor Portugis untuk tetap berhati-hati dan tetap waspada dengan kondisi dan keadaan yang sekarang ini terjadi. Karena dikhawatirkan akan terjadi serangan yang mengakibatkan banyak memakan korban jiwa.

Partai-partai yang sedang berjaya di Timor Portugal seperti partai UDT, Apodeti, KOTA dan Trabhalista meyatakan untuk menyatukan diri dengan Republik Indonesia. Pernyataan dari partai-partai tersebut juga menyerukan kepada semua pihak yang bersangkutan untuk secara sungguh-sungguh mengusahakan tercapainya pelaksanaan Dekoloniasasi wilayah Timor Portugal secara wajar, tertib dan damai. Hal ini dilakukan agar dekolonisasi cepat berjalan dan tidak menimbulkan banyak konflik lagi yang akan membuat banyak korban berjatuhan yang nanti pada akhirnya akan merugikan negara.

Prores dekolonisasi yang wajar, tertib dan damai demikian itulah yang diinginkan oleh Pemerintah Indonesia untuk menggunakan haknya yang sah dalam mempertahankan keutuhan wilayah, kedaulatan negara dan perlindungan terhadap keselamatan penduduk serta harta benda mereka. Selama proses dekolonisasi ini berlangsung negara-negara yang bersangkutan diminta untuk bisa berlaku kooperatif selama proses ini dilakukan.

Akan tetapi proses dekolonisasi mengalami banyak hambatan dan tidak berjalan mulus. Perkembangan proses dekolonisasi ini semakin gawat dan

dan kejahatan yang kejam dilakukan oleh Fretillin. Sementara pemerintahan Portugal yang pada saat itu berkuasa tidak mampu mengendalikan serta memulihkan keamanan dan ketertiban di wilayah itu.

Dalam hal ini diingatkan tentang penawaran Indonesia untuk membantu Portugal dalam upaya mengembalikan keamanan dan ketertiban di Timor Portugis dan tentang terjadinya pengungsian puluhan ribu jiwa di daerah Timor Portugal ke wilayah Indonesia. Maka ditegaskan juga bahwa Pemerintah dan 130 juta jiwa rakyat Indonesia telah sangat cukup menahan diri terhadap serangan-serangan mortir ke wilayah Republik Indonesia, seperti serbuan-serbuan, perampokan-perampokan, dan lain-lain. Bahkan provokasi yang dilakukan oleh Fretillin terhadap wilayah Indonesia.[47]

Keadaan seperti inilah yang sebenarnya menambah gangguan-gangguan terhadap stabilitas nasional dan juga mengancam keamanan Indonesia. Masalah lainnya yang sudah sangat kompleks dan sudah mencapai pada puncaknya adalah "pernyataan kemerdekaan yang disampaikan Fretillin" yang menyebabkan "memorandum Roma" menjadi sangat sulit untuk dilaksanakan. Sementara Portugal menyatakan kepada Dewan Keamanan PBB tidak mampu lagi mengatasi keadaan di Timor Portugal.

Keadaan yang semakin kacau balau dan tidak terkendali ini, membuat Portugal angkat tangan untuk menyelesaikannya. Portugal dengan sekuat tenaga sudah berusaha untuk menyelesaikannya, namun hongga kini juga belum mendapatkan hasil yang signifikan akan keadaan yang bisa di sebut damai di Timor. Pernyataan Portugal kepada PBB bahwasannya Portugal sudah tidak bisa

---

[47] Suara Karya 5 Desember 1975

mengatasi keadaan di Timor Portugal bukan semata-mata ingin lepas ta konflik dan gejolak yang ada.

Oleh karenanya pemerinta Republik Indonesia dapat memal menganggap wajar dengan pernyataan yang telah dikeluarkan oleh UD' Apodeti dan Trabhalista yang secara bersama dan serentak mengatakan rakyat Timor Portugal melepaskan diri dari penjajahan dan menyatakan memilih bergabung dengan Indonesia pada masa itu.[48]

B. Integrasi Timor Timur 1976

1. Utusan Khusus Sekjen PBB

Kedatangan utusan khusus Sekjen PBB merupakan kesempatan bagi kita untuk merenungkan dimana kita berada sekarang dan sedna alam kondisi seperti apa serta bagaimana kiranya masalah ini akan te dan perkembangan selanjutnya. Oleh karenanya anggapan bahwa l Kemerdekaan Indonesia hanya meliputi kawasan bekas jajahan Hindi maka kita hampir tidak mempunyai perhatian terhadap Timor Timu "revolusi bunga" begejolak yang membuka jalan untuk dekolonisasi l jajahan Portugal.

Indonesia tidak pernah merasa mempunyai klaim atas Tim Sekiranya proses dekolonisasi ini dilakukan itu akan berlangsung der wajar dan teratur, tanpa menghadapkan Indonesia pada suatu hal merugikan kepentingan Indonesia sendiri dan malah melibatkan Indo

masalah Timor Timur ini. Masalah Timor Timur ini adalah masalah ketidak mampuan Portugal untuk melaksanakan dekolonisasi itu dengan cara yang wajar, yang sekarang justru melibatkan kita didalamnya.

Memorandum Roma antara Indonesia dan Portugal, Nopember 1975 masih membuka kesempatan untuk mencapai penyelesaian yang wajar. Namun dengan proklamasi yang bersifat sepihak itu Fretillin telah mencabut pelaksanaan memorandum tersebut. Dapat kita lihat disini bagaimana kebusukan Fretillin yang selalu saja membuat masalah Tmor Timur ini makin rumit dan tidak cepat terselesaikan. Kebusukan-kebusukan dan haus akan kekuasan untuk dapat menguasai wilayah Timor Timur dapat tergambar jelas dari serangan-serangan tak terduga Fretillin.[49]

Serangan tak terduga yang dilakukan Fretillin ini semata-mata hanya ingin menempatkan Indonesia dalam keadaan yang tidak mengenakkan. Dimana Indonesia seolah-olah diharuskan untuk memilih diantara dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah tidak berbuat apa-apa. Hal ini dapat diprediksikan dengan besar kemungkinan bahwa Fretillin akan memperoleh banyak dukungan secara Diplomatik dan senjata, antara lain dari RRC. Maka dengan keadaan demikian besar kemungkinan bahwa Timor Timur akan menjadi Angola kedua. Maka dengan keadaan seperti ini sangat tidak menguntungkan bagi negara-negara lain tidak hanya untuk Indonesia tetapi juga Australia. Karena kepentingan nasional negara mereka terganggu dan tidak bisa terpenuhi dengan baik, bahkan bukan hanya kedua negara teersebut yang mendapat kerugian. Kepentingan Asia Tenggara juga ikut terganggu.

Kemungkinan yang kedua adalah salah satu bentuk memenuhi permintaan UDT-Apodeti dengan suatu tindakan cepat guna menutup pintu bagi proses Angolanisasi. Dalam hal ini ada resiko yang besar, bahwa dunia internasional akan salah menafsirkan tindakan itu. Karena tidak adanya cukup waktu untuk menjelaskan dilema buatan Fretillin yang memaksa kita mengambil tindakan itu.

Pada umumnya para anggota-anggota PBB juga tidak dapat menyangka jika UDT dan Apodeti dengan bantuan Indonesia tidak melakukan hal tersebut, sudah dapat dipastikan jika Timor Timur akan mengalami masalah yang sama seperti yang terjadi di Angola. Dimana pergolakan-pergolakan yang dilakukan rakyat semakin bergulir dengan cepat dan tindak kekerasan yang anarki juga semakin tidak terkendali. Korban-korban banyak yang berjatuhan yang menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakatnya.

Resolusi yang diberikan oleh Dewan Keamanan PBB pastinya telah melakukan pengamatan secara obyektif dan realistis. Tercatat ada tiga hal penting antara lain :

a. Resolusi Dewan Keamanan PBB memberikan peranan kepada Portugal dalam proses dekolonisasi di Timor Timur. Guicciardi pasti akan melihat bahwa memberikan peranan kepada Portugal akan sama sulitnya dengan menghidupkan kembali mayat. Sebab kedaulatan Portugal atas Timor Timur sekarang ini dapat disamakan dengan mayat yang masih dan hanya perlu dikubur saja secara resmi

b. Memberikan peranan kepada Fretillin di Timor Timur akan sama saja dengan mengundang "cukong-cukongnya" atau dengan sekutunya yaitu RRC. Vietnam Utara dan Korea Utara. Jelas bahwa rakyat Timor Timur dan

Indonesia umumnya tidak bersedia untuk memberikan Dewan Keamanan PBB meng-Angolakan Timor Timur

c. Apapun yang aka terjadi selanjutnya, namun yang diperlukan di Timor Timur adalah mengisi kekosongan administratip yang diakibatkan oleh periode kekacauan yang cukup lama serta memulihkan kesempatan bagi rakyat untuk hidup dengan tentram. Satu-satunya pihak yang dapat mengisi kekosongan administratip dan memulihkan ketertiban itu adalah pemerintahan sementara Timor Timur. Dalam hal ini Indonesia tidak dapat melepaskan dirinya dari kewajiban untuk memenuhi permintaan bantuan dari pemerintah sementara Timor Timur.[50]

Seperti yang sudah dapat diprediksikan jika Timor Timur memang akan memilih untuk merdeka dan menentukan nasibnya sendiri. Hal ini pun disambut positif baik dari pihak Indonesia sendiri maupun dari PBB. Keinginan Timor Timur untuk bisa bebas dan merdeka memang sudah terpendam cukup lama. Bahkan untuk merealisasikan keinginannya ini pun Timor Timur harus menelan kenyataan pahit. Karena Timor Timur berada pada ambang ketidak pastian yang menuntut mereka untuk melakukan pergolakan untuk merdeka.

Portugis yang sudah menyerah dengan keadaan yang semakin rumit dan semakin mencekam di Timor Timur sudah menyerahkan urusan ini kepada Dewan Keamanan PBB. Kemudian PBB memberikan kejelasan tentang kedudukan sementara untuk Timor Timur, yakni dengan membangun pemerintahan sementara. Pemerintahan sementara ini adalah upaya yang diberikan oleh PBB agar Timor Timur bisa memenuhi kepentingan luar negerinya dengan negara-negara lain dan

---

[50] Sinar Harapan 15 Januari 1976.,yang diambil dalam buku *Dokumentasi Integrasi Timor Timur 1976*., hlm 8

mempermudah urusan untuk meminta bantuan kepada negara lain.

Karena sangat tidak memungkinkan bagi Timor Timur untuk membentuk suatu pemerintahan baru sekarang ini. Kondisi yang sedang tidak baik tidak memungkinkan untuk mereka membuat suatu pemerintahan yang syah dan tetap. Semenjak Fretillin mengombang ambingkan nasib mereka, masyarakat Timor Timur mulai sadar jika diri mereka sedang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Kemerdekaan yang dijanjikan oleh Portugis pun tidak kunjung tiba. Malah Portugis menyerah dengan keadaan yang ada sekarang ini.

Fretillin yang juga sudah mengumbar janji akan memerdekakan mereka, ternyata hanya sebuah wacana saja. Justru sekarang karena Fretillin Timor Timur bergejolak dan juga terjadi anarki pada kelompok-kelompok tertentu. Bahkan yang dirugikan dari sikap anarki mereka ini tidak hanya segelintir orang. Semua rakyat Timor Timur pun turut merasakan dampaknya. Maka dari itu sebelum banyak berjatuhan korban jiwa, semua rakyat Timor Timur yang berada di perbatasan diungsikan sementara ke wilayah Indonesia.

Bahkan setelah diberikan kemerdekaan sediri untuk negaranya Timor Timur, Indonesia masih juga belum bisa bebas atau lepas dari sangkut paut konflik di Timor Timur. Sempat terjadi kerusuhan yang menghebohkan beberapa negara yang diakibatkan oleh segelintir orang di Timor Timur. Salah satunya ada dengan adanya berita pemboikotan sarana dan prasarana dari Australia ke Indonesia. Laut yang pada saat itu sebagai salah satu jalur alternatif yang sangat efektif untuk [illegible] hubungan dagang dan pengiriman ekspor impor justru ditutup

Kapal-kapal Australia yang akan bersandar di pelabuhan di Timor Timur yang akan mengirimkan barang ke Indonesia juga di boikot. Hal-hal inilah yang membuat suasana semakin rumit dan semakin tidak terkendali. Susahnya akses negara lain yang mau masuk dan penutupan secara sepihak. Padahal yang kita ketahui sejak tumbuhnya pemerintahan orde baru Indonesia, hubungan antara Australia dan Indonesia berkembang dengan baik. Bahkan dapat dikatakan kedua negara tersebut mempunyai hubungan yang sangat akrab.

Namun terkadang hubungan-hubungan baik ini menjadi sulit terkendali akibat persoalan-persoalan sepele. Dalam hubungan ini banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang melakukan demonstrasi. Demonstrasi yang kemudian ditunjukkan juga terhadap pengusiran Atase Kebudayaan Indonesia. Karena masalah yang dipersoalkan oleh mereka sebenarnya adalah masalah dalam negeri Indonesia dan masalah hubungan kedutaan Indonesia dengan warga negara Indonesia yang berada diluar negeri. Masalah-masalah seperti inilah yang disebut masalah sepele. Karena ini adalah masalah dalam negeri Indonesia sendiri bukan dengan negara lain. Jadi seharusnya biarkan Indonesia sendiri yang menyelesaikannya.

Maka jika dengan adanya masalah seperti ini salah satu pihak ada yang menanggapi, maka akan rusaklah hubungan baik yang sudah mereka bina. Maka kedua negara juga perlu menyadari bahwasannya masalah-masalah yang sama seperti ini pasti juga akan sering muncul, dan jika ini masih menjadi perhatian maka akan rusak hubungan baik antar kedua negara tersebut. Seperti masalah Timor Timur yang sekarang sedang terjadi pergolakan yang cukup rumit. Jika

maka mereka akan berkonflik nantinya. Karena masing-masing negara mempunyai kepentingannya sendiri di wilayah itu. Bisa saja mereka sama-sama menuntut atau saling tuding untuk menjadi penengah dari konflik ini. Maka dari itu tiap negara yang mempunyai hubungan baik jangan mudah terpengaruh, agar tetap bisa terpenuhi kepentingan negaranya.[51]

C. Pelanggaran HAM Berat Pada Pasca Pelaksanaan Jajak Pendapat di Timor-Timur

Timor Timur akhirnya merdeka. Mayoritas rakyat Timor Timur menolak otonomi luas yang ditawarkan Presiden Habibie dalam jajak pendapat yang diselenggarakan pada 30 Agustus 1999. Namun, kemerdekaan mereka tidak membebaskan Indonesia. Sebaliknya, penolakan rakyat Timor Timur terhadap tawaran otonomi luas menyisakan serangkaian krisis baru yang menghambat upaya Indonesia keluar dari krisis ekonomi dan politik yang melanda negeri ini.

Lepasnya Timor Timur dari Indonesia merupakan kekalahan bagi Indonesia. Negara besar ini terpuruk oleh kegigihan sekelompok kecil masyarakat untuk memperoleh kemerdekaan. Keputusan rakyat Timor Timur untuk merdeka tidak terlepas dari tindak-tanduk TNI di bekas provinsi Indonesia ke-27 itu. Pelanggaran HAM oleh anggota TNI merupakan alasan yang paling sering dikemukakan untuk menjelaskan keputusan rakyat Timor Timur tersebut. Selain dianggap bertanggungjawab atas lepasnya Timor Timur dari Indonesia, TNI juga menghadapi tuduhan melakukan pembunuhan massal, pembakaran, penjarahan, serta berbagai tindak kekerasan lain seusai jajak pendapat pada 30 Agustus 1999.

Masyarakat Internasional (Barat) melakukan berbagai upaya untuk membawa tersangka pelanggar HAM di Timor Timur ke pengadilan Internasional. Salah satu syarat bagi digelarnya pengadilan Internasional ialah skala perbuatan (kejahatan) yang dilakukan.

Menurut **Nathan Hancock** dalam artikelnya, *A War Crimes Tribunal for East Timor?* akan ada keraguan mengenai fakta yang diperlukan untuk mendukung pengadilan Internasional (bagi pelaku kejahatan di Timor Timur). Dia menulis,[52]

> *"...mungkin tidak ada konflik bersenjata yang melatarbelakangi (kejadian di Timor Timur) dan tindak (kekerasan yang terjadi) mungkin tidak dalam skala yang cukup besar untuk bisa dimasukkan ke dalam kategori kejahatan kemanusiaan".*[53]

Sungguh naif untuk menimpakan semua kesalahan atas apa yang terjadi di Timor Timur pada TNI seperti terlihat dalam upaya membawa pelaku pelanggaran HAM di Timor Timur ke pengadilan.[54]

Peradilan terhadap tersangka pelaku pelanggaran HAM seakan mengecilkan masalah Timor Timur hanya sebatas masalah HAM. Kegagalan pemerintah sipil untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur serta demokratis dan

---

[52] Law and Bill Digest Group, 19 Oktober 1999, Parliament of Australia.. yang diambil dalam tesis yang berjudul "PELANGGARAN HAM YANG TERJADI PADA PASCA JAJAK PENDAPAT DI TIMOR TIMUR (Peradilan HAM Ad Hoc Timor Timur)"

[53] Sebagai perbandingan, pengadilan kriminal Internasional yang digelar bagi tersangka pelaku genocide (pemusnahan massal) dan pelanggaran serius lain terhadap hukum humaniter yang terjadi di Rwanda antara 1 Januari 1994 dan 31 Desember 1994 menyangkut nyawa. Diperkirakan dalam waktu kurang dari empat bulan, antara 500.000 hingga satu juta orang terbunuh dalam kampanye pemusnahan massal yang dilancarkan oleh suku Hutu terhadap suku Tutsi. Pengadilan kriminal Internasional untuk Rwanda merupakan pengadilan Internasional pertama yang dilakukan untuk mengadili pelaku *genocide*.,yang diambil dalam tesis yang berjudul "PELANGGARAN HAM YANG TERJADI PADA PASCA JAJAK PENDAPAT DI TIMOR TIMUR (Peradilan HAM Ad Hoc Timor Timur)"

[54] Chris Donnelly, Penasihat Khusus NATO untuk Masalah Eropa Tengah dan Timur, dalam artikelnya, *Defence transformation in the new democracies: A framework for tackling the problem*, mengatakan bahwa angkatan bersenjata merupakan cermin dalam membentuk jati dirinya dibandingkan dengan potensi ancaman. Walau bahasan Donnelly difokuskan pada Eropa Tengah dan Timur, namun ia juga mengatakan bahwa di dalam masyarakat mana pun, sejarah dalam negeri dan kebudayaan nasional merupakan faktor yang biasanya berperan dalam menentukan besar kecil dan bentuk angkatan perang. NATO Review, Web Edition, No. 1 – Jan. 1997, Vol. 45 – pp 15 – 19.,yang diambil dalam tesis yang berjudul "PELANGGARAN HAM YANG

maraknya praktik korupsi dan kolusi merupakan faktor utama lain yang menyebabkan ketidakpuasan masyarakat di Timor Timur. Semua ketidakpuasan itu diperparah oleh

berbagai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh anggota TNI. Tidaklah mengherankan bila kelompok anti integrasi, yang selama 23 tahun tidak pernah berhenti melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan cita-cita mereka melepaskan diri dari Indonesia, memperoleh dukungan yang semakin besar dari kalangan masyarakat Timor Timur.

> *"...dari sisi geografis saja Indonesia berada di pihak yang dilematis menghadapi apa pun hasil jajak pendapat bagi masyarakat Timor Timur"*[55]

Ketidak berdayaan rakyat Timor Timur terhadap kepentingan politik jelas terlihat ketika N. Parameswaran, kepala staf UNTAET, mengundurkan diri dari jabatannya awal Januari 2002. Parameswaran yang berasal dari Malaysia mengatakan UNTAET

telah menjadi "misi yang sangat putih", "misi Timur dengan wajah Barat". Dalam suratnya kepada Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan, Parameswaran juga menuduh bahwa upayanya untuk mendorong rekonsiliasi dan pengembalian pengungsi ke Timor Timur dihalangi oleh McNamara yang berkebangsaan Selandia Baru, serta beberapa orang lain. McNamara ditunjuk menjadi wakil Sergio Vieira De Mello, pemimpin UNTAET yang juga Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB.

---

[55]Antara, 6 Mei 1999.,yang diambil dalam tesis yang berjudul "PELANGGARAN HAM YANG TERJADI

Tuduhan Parameswaran bahwa UNTAET didominasi oleh orang kulit putih untuk kepentingan politik orang kulit putih, yang dibantah oleh badan PBB dan Ramos Horta, tidaklah mengejutkan. Kalau dulu, pada era integrasi, Timor Timur "dikuasai" oleh Indonesia, maka setelah jajak pendapat ada empat "negara" yang "memerintah" di sana, yaitu Portugal, Australia, Amerika Serikat, dan "PBB".[56] Ini kenyataan dan inilah buah kemerdekaan Timor Timur.[57]

Opsi Kedua Habibie, yang secara resmi diumumkan pada 27 Januari 1999 oleh Menteri Luar Negeri Ali Alatas, menimbulkan berbagai reaksi baik di dalam maupun di luar negeri, mulai dari ungkapan tidak percaya hingga kepanikan, baik di kalangan pro maupun anti integrasi. Memasuki periode 1999, sebagian masyarakat Indonesia seolah telah kehilangan kesabaran atas tekanan Internasional karena masalah Timor Timur dan ingin pemerintah segera melepaskan Timor Timur, bukan karena rakyat Timor Timur layak mendapatkan kemerdekaan mereka, namun karena masyarakat Indonesia merasa Timor Timur-lah yang menyebabkan pemerintah Indonesia terus-menerus mendapatkan tekanan dari kalangan Internasional, terutama berkaitan dengan berbagai pelanggaran HAM di daerah itu.

---

[56] Direktur Yayasan HAK, Aniceto Guterres Lopes, yang juga anggota Dewan Nasional (Timor Timur), mengingatkan dalam diskusi dua mingguan yayasan tersebut, agar rakyat Timor Timur bersikap kritis terhadap kepentingan jangka pendek dan jangka panjang PBB. Dalam jangka pendek bermain kepentingan staf PBB yang dengan misinya di sini (Timor Timur) ingin kariernya naik. Buat mereka, rakyat Timor Timur tidak menjadi pertimbangan penting. "Bagi mereka yang penting program berjalan lancar sesuai dengan rencana mereka." Lihat Direito, Dwi Mingguan Hak Asasi Manusia, 4 Juni 2001.,yang diambil dalam tesis yang berjudul "PELANGGARAN HAM YANG TERJADI PADA PASCA JAJAK PENDAPAT DI TIMOR TIMUR (Peradilan HAM Ad Hoc Timor Timur)"

[57] Dalam laporannya pada 10 Januari 2000, Pusat Studi dan Pengkajian Yayasan HAK yang berkantor pusat di Dili mengatakan bahwa kini Timor Timur menghadapi operasi baru, yaitu "operasi kemanusiaan".,yang diambil dalam tesis yang berjudul "PELANGGARAN HAM YANG TERJADI PADA PASCA JAJAK

Namun demikian, tuduhan bahwa TNI dan Polri berpihak,bahkan mendukung kelompok milisi, memang beralasan. Keterkaitan, bahkan kerja sama, antara militer formal dan milisi bukanlah sesuatu yang baru atau hanya terjadi di Timor Timur. Pada awal Perang Saudara di Timor Timur, partai politik di sana membentuk kelompok bersenjata. Dari ketiga partai terbesar yang muncul pada 1974, yaitu *Uniao Democratica Timorense* (UDT), *Associacao Social Democratica Timorense* (ASDT), yang kemudian berganti nama menjadi *Frente Revolucionaria de Timor Leste Independente* (Fretilin) dan *Associacao Popular Democratica Timorense* (Apodeti), milisi Fretilin-lah yang memiliki kekuatan terbesar, antara lain karena dukungan Portugal,termasuk dukungan senjata dan amunisi.

Perebutan kekuasaan di Timor Timur setelah gubernur yang terakhir, Kolonel Mario Lemos Pires, lari ke Pulau Atauro dan dengan demikian mengakhiri kekuasaan Portugal atas bekas koloninya itu, dan melibatkan milisi yang dibentuk oleh masing-masing partai, termasuk milisi pro-integrasi yang didukung TNI